



LAMPIRAN 01

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 134/UN48.8.1/DL/2023
Hal : *Pengumpulan Data*

7 Februari 2023

Kepada
Yth. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)
d/a Jalan Dewi Sartika No.24, Kaliuntu
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **“Peran Kantor Pertanahan Dalam Pencegahan Sengketa dan Konflik Pertanahan di Kabupaten Buleleng”** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data peran kantor pertanahan dalam pencegahan sengketa, konflik dan faktor-faktor penyebab tingginya kasus sengketa tanah di Kabupaten Buleleng yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : I Gusti Ketut Riski Suputra
Nomor induk Mahasiswa : 1814101113
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan
1. Arsip

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia



LAMPIRAN 02

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dalam pencegahan sengketa dan konflik pertanahan di Kabupaten Buleleng?
2. Apakah faktor-faktor penyebab tingginya kasus sengketa tanah di Kabupaten Buleleng?

B. Pertanyaan untuk Narasumber dari Badan Pertanahan Nasional

- 1) Apa saja kewenangan dan fungsi Badan Pertanahan nasional?
- 2) Apakah BPN memiliki kewenangan/fungsi untuk meminimalisir sengketa tanah?
- 3) Apa dasar hukum kewenangan tersebut?
- 4) Apakah BPN punya kewenangan/fungsi untuk memberikan sosialisasi pada masyarakat tentang sengketa tanah (dengan tujuan meminimalisir kesalahan yang dapat menimbulkan sengketa)?
- 5) Bagaimana cara penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Buleleng yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng?
- 6) Apa saja hambatan dalam melakukan penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Buleleng?
- 7) Apa faktor-faktor yang menyebabkan tingginya kasus sengketa tanah di Kabupaten Buleleng?



LAMPIRAN 03

DAFTAR NARASUMBER

DAFTAR NARASUMBER

1. Nama : I Gede Susana, A. Ptnh.
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa
Kabupaten Buleleng





LAMPIRAN 04

DOKUMENTASI PENELITIAN

**Wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa
Kabupaten Buleleng**



RIWAYAT HIDUP



I Gusti Ketut Riski Suputra, lahir di Mataram pada tanggal 16 Mei 2000. Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni Ayah I Gusti Made Tjintiasbawa dan Ibu Gusti Ayu Komang Triarwati (Alm). Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jalan Mayor Metra Gang XIV, Nomor 8, Liligundi, Buleleng, Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 2 Liligundi dan lulus pada tahun 2012.

Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 6 Singaraja dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2018, penulis lulus dari sekolah menengah atas yakni SMA Negeri 2 Singaraja dengan mengambil jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA). Kemudian, penulis melanjutkan ke Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2018. Pada semester akhir yaitu di tahun 2022, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Kantor Pertanahan dalam Pencegahan Sengketa dan Konflik Pertanahan di Kabupaten Buleleng”. Selanjutnya, dari tahun 2018 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.